



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 914/I/VII/2016

**DPR RI ingatkan
Tanggung Jawab Besar Tito Karnavian**

Pimpinan DPR RI Santuni Seribu Anak Yatim Piatu

**Komisi V Targetkan Zero Accident
Saat Mudik Lebaran**



GRATIS
Tidak Diperjualbelikan



Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo dan Pimpinan DPR RI

DPR RI ingatkan, Tanggung Jawab Besar Tito Karnavian

Sidang Paripurna DPR RI, Senin (27/6) yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyetujui Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Persetujuan ini berdasar pada penerimaan laporan Komisi III DPR RI yang disampaikan Ketuanya Bambang Soesatyo.

Laporan Komisi III DPR RI terkait dengan uji kelayakan dalam melakukan penilaian dan kesungguhan terhadap Calon Kapolri. Pimpinan Sidang Paripurna ke 31 ini menanyakan kepada sidang dewan DPR RI terkait hasil uji kelayakan Tito Karnavian sebagai Calon Kapolri.

"Sidang Dewan yang terhormat sekarang perkenankan kami, menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi III DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan *Fit and Proper Test* Calon Kapolri tersebut dapat disetujui?" tanya Fadli kepada para Anggota Dewan, yang serentak dijawab "setuju!" ketukan palu tiga kali menandai persetujuan DPR RI terhadap Tito sebagai Calon Kapolri yang selanjutnya tinggal dilantik oleh Presiden Joko Widodo.

Setelah DPR RI menyetujui, Tito

pun dihujani dengan harapan oleh Sidang Dewan, merupakan tanggung jawab besar yang dibebankan di pundak Tito, untuk ditunaikan dengan baik.

Anggota Dewan dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengharapkan kepada Tito agar tugas Densus 88 di bawah koordinasi Polri dalam pemberantasan terorisme bisa bekerja secara profesional. Selain itu dia juga meminta agar masalah narkoba dan beragam kekerasan bisa dihilangkan dari Indonesia.

Anggota dewan dari dapil Nusa Tenggara Timur I Johnny G. Plate juga meminta kepada Tito agar permasalahan *human trafficking* yang sampai saat ini masih merebak di NTT dapat diatasi.

Selain itu juga Tito yang pernah menjabat sebagai Kapolda Papua, dituntut bisa mengungkap dalang dari penembakan misterius yang terjadi di

Papua. Tito diharap mampu membawa pelaku penembakan ke hadapan hukum dan menyudahi teror penembakan di Papua.

Setelah beberapa Anggota Dewan mengungkapkan harapan kepada Tito, Pimpinan Sidang Fadli Zon mempersilakannya maju ke depan meja sidang Pimpinan Dewan untuk berjabat tangan dengan Para Pimpinan DPR RI dan diperkenalkan kepada para awak media, serentak para jurnalis foto menyambut dengan jepretan kamera.

"Kami perkenalkan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri terpilih yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna hari ini yaitu Komjen Pol Tito Karnavian untuk maju ke meja pimpinan," ujar Fadli. ■

Petani Harus Dihormati

"Negeri ini harus menghormati petani. Petani harus dimanjakan dengan memberi subsidi besar-besaran seperti di Amerika."

Demikian Ketua DPR RI Ade Komaruddin menyampaikan pernyataannya di hadapan kelompok tani se-Kabupaten Bogor, Kamis (23/6). Dari para petanilah distribusi pangan bermula untuk semua penduduk negeri. Program swasembada pun tanpa dukungan petani tak mungkin dilakukan. Namun, hingga kini petani belum mendapat kemudahan akses modal lewat perbankan. Apalagi, bila bencana alam datang, petani pun merugi dan kurang mendapat perhatian.

Akom, demikian Ketua DPR RI akrab disapa, menyerukan agar dunia perbankan bisa memberi fasilitas kemudahan kredit bagi para petani. Dan bila ditimpa bencana alam yang mengakibatkan kerusakan tanaman, diharapkan ada fasilitas hapus buku yang diberikan perbankan. BLBI saja diberi fasilitas hapus buku. Ironis, bila petani tak mendapat fasilitas yang sama.

Untuk memajukan sektor pertanian, sambung Akom, perlu dihidupkan kembali adanya mantri pertanian di desa-

desa yang memberi penyuluhan pertanian. Dahulu, katanya, mantra tani rajin turun ke sawah-sawah menemui para petani

Pangan. Jadi, nanti sembako di-cover oleh badan urusan pangan itu. Dulu sudah ada Bulog, tapi kemudian berubah menjadi Persero dan sekarang menjadi Perum. Kalau Persero dia cari untung. Bulog kembali saja ke khittah yang lama. Dengan begitu, yakin sembako akan aman. Ketahanan pangan, swasembada, ketersediaan, kualitas, dan harga pangan semuanya terjamin," papar Akom lagi.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Bupati Bogor, Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus, Ketua DPRD Bogor, Kapolres Bogor, Danrem Bogor, dan Dinas

Pertanian. Para petani pun menyambut baik apa yang disampaikan Akom. Dalam kesempatan itu, Akom juga menyerahkan secara simbolis bantuan traktor dan mesin tanam kepada para kelompok tani.

Bupati Bogor Nurhayanti menjelaskan, di kabupaten yang dipimpinnya ada lahan pertanian seluas 92 ribu hektar. 81% diantaranya sudah ditanami. Para petani di kabupaten Bogor, selain menanam padi juga menanam jagung dan kedelai. Ada 225 kelompok tani yang tersebar di kabupaten Bogor. Dan secara bergiliran mendapat bantuan alat-alat pertanian. ■



Ketua DPR RI Ade Komarudin berdialog dengan kelompok tani se-Kabupaten Bogor

dengan menggunakan fasilitas mobil trail. Hasilnya, swasembada pangan di era Orde Baru tercapai.

"Dahulu penyuluh pertanian sangat berperan bagi pembangunan desa. Mereka jebolan SPMA lalu melanjutkan pendidikannya ke IPB. Sebagai negara agraris, mestinya diadakan kembali," ujar Akom. Sementara menjawab pertanyaan seputar peran Bulog, ia menyerukan agar Bulog dikembalikan perannya seperti dulu yang mengelola distribusi dan harga pangan.

"Kita desak pemerintah untuk segera mewujudkan amanah UU tentang



PENAWAS UMUM Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR -RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Suratna, M.Si (Kabag Media Cetak & Media Sosial) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arianindy, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.Illham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 J. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djujiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Mudiyanto, Barliansyah **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email penerbitandpr@gmail.com

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Pimpinan DPR RI Santuni Seribu Anak Yatim Piatu

Pimpinan DPR RI menyantuni seribu anak yatim piatu di Masjid Baitur Rahman, Komplek MPR/DPR RI. Berbagi kebahagiaan dengan para anak yatim jadi rutinitas jelang Idul Fitri. Para anak yatim piatu pun menyambut bahagia acara tersebut.

“ Saya selaku Ketua Dewan bersama Wakil Ketua, dan kesekjen iuran untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Ini rutin tiap tahun dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kita harus berbagi kebahagiaan. Kita yang mendapat kesempatan

berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang berhak, baik anak-anak maupun orang tua,” ucap Akom Ketua DPR RI, Jumat (24/6).

Hadir pula dalam acara tersebut tiga Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto. Pimpinan DPR RI membagikan paket dan uang santunan. Para yatim piatu



Ketua DPR RI Ade Komarudin memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim piatu

tersebut didatangkan dari 15 yayasan plus tiga kelompok anak asuh. Mereka datang dari berbagai tempat, Bogor, Jakarta, dan Tangerang.

Dalam kesempatan Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany juga menyambut baik acara santunan tersebut. Ini acara yang keempat kalinya dihelat di masjid yang sama. “Ya, alhamdulillah kita

diberikan kesehatan, kemudian dilimpahkan rezeki. Jadi, Ramadan ini penuh berkah. Untuk itu, kita ingin berbagi dengan anak-anak yang kurang mampu. Kita, memang, mengundang sekurang-kurangnya seribu anak yatim,” jelas Win, Sekjen DPR RI usai acara.

Tujuannya, sambung Win lagi, agar anak-anak yatim piatu merasakan kebahagiaan dan berkah di bulan suci ini. Sudah jadi kewajiban orang-orang yang mampu untuk berbagi kepada yang miskin. Para yatim piatu tersebut dijemput dari berbagai tempat dan kemudian diantarkan ke DPR RI.

“Insyallah tiap tahun akan terus diselenggarakan di bulan Ramadan. Tapi tentu tidak hanya itu, ada kegiatan-kegiatan lain seperti keprihatinan terhadap bencana alam di daerah. Kegiatan sosial sudah beberapa kali dilaksanakan oleh DPR RI,” ungkap Win. ■

(ukha), Foto: Kremanbr

Ketua DPR RI Sidak Pasar Cibinong

Selama Ramadan dan jelang lebaran ini, Ketua DPR RI Ade Komarudin rajin mengunjungi pasar-pasar tradisional untuk melihat perkembangan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.



Ketua DPR RI Ade Komarudin memantau harga dan ketersediaan pangan di pasar Cibinong

Pada Kamis (23/6), Akom, begitu Ketua DPR RI biasa disapa, mengunjungi pasar Cibinong di Kabupaten Bogor. Disambut para pedagang dan pembeli, Akom mengelilingi pasar tersebut. Sesekali berhenti untuk berinteraksi dengan para pedagang.

Di pasar tersebut ia menyempatkan diri membeli 2 kg daging sapi seharga Rp220 ribu. Adin pedagang daging

tersebut menjelaskan, harga daging saat ini masih di kisaran Rp110/kg. Pada Ramadan tahun lalu, harga daging mencapai Rp140 ribu/kg.

Sementara itu, komoditas lainnya di Pasar Cibinong, seperti daging ayam harga Rp34 ribu/kg. telur ayam mencapai Rp22 ribu/kg. Tahun lalu harga telur ayam lebih mahal, yaitu Rp24-25 ribu/kg. Dari pantauan di pasar tersebut, harga-harga bahan kebutuhan pokok sudah turun walau tidak signifikan di banding tahun lalu. ■

(mb) foto: Anief/br

DPR RI Harapkan Tito Karnavian Bawa Polri Jadi Polisi Rakyat

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyadari dan memahami bahwa kecakapan, integritas dan kompetensi calon Kapolri merupakan prasyarat mutlak untuk menjadi Kapolri.

Atas dasar itulah, Komisi III menyetujui usulan Surat Presiden Nomor R/Pres/06/2016 tertanggal 15 Juni 2016 perihal pemberhentian Jenderal (Pol) Drs. Badrodin Haiti dan pengangkatan Komjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA., Ph.D sebagai Kapolri. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke 31 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (27/06).

"Dengan memahami kecakapan, integritas, dan kompetensi Calon Kapolri yang merupakan syarat mutlak untuk menjadi Kapolri, maka Komisi III menyetujui mengangkat Calon Kapolri yang diusulkan Presiden, dengan harapan Kapolri terpilih sungguh-sungguh dapat



Ketua Komisi III Bambang Soesatyo menyampaikan laporan fit and proper test calon Kapolri baru

meningkatkan citra dan wibawa Polri," ujar Bambang

Ia pun menegaskan bahwa polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pemilihan Kapolri tidak boleh dilakukan dengan asal-

asalan.

Politisi Golkar itu juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Jenderal (Pol) Drs. Badrodin Haiti yang telah mencurahkan tenaga selama menjabat sebagai Kapolri. "Komisi III mengucapkan terima kasih kepada Jenderal (Pol). Badrodin Haiti yang telah mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya secara profesional dalam melaksanakan tugasnya demi keamanan dan ketertiban dalam negeri," jelasnya.

Bambang pun berharap Tito dapat menjadikan Polri sebagai polisi rakyat yang mengayomi, melayani dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. "Atas nama Komisi III DPR RI, kepada saudara kami titipkan masa depan Polri dan nasib anggota Bhayangkara. Jadikanlah Polri sebagai polisi rakyat yang mengayomi, melayani dan memberikan rasa aman masyarakat," pesan Bambang Soesatyo yang akrab dipanggil Bamsuet. ■

(b.s.mp) Foto: Azka/bf

Masih Ada Potensi Kemacetan di Pantura

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI saat meninjau jalur mudik 2016, masih ditemukan titik yang berpotensi menjadi pusat kemacetan. Wakil Ketua Komisi V, Yudi Widiana, menjelaskan, titik yang perlu dicermati dan diantisipasi petugas baik polisi maupun Kemenhub yakni *exit* tol Brebes Timur.

"Kita cemas dengan *exit* tol Brebes Timur ini, yang akan menjadi titik kemacetan," ujarnya saat pertemuan *exit* tol Brebes Timur, Kamis (23/6).

Politisi PKS ini meminta agar marka jalan tol Pejagan - Brebes Timur untuk diganti warna catnya dari warna putih dengan warna kuning untuk membedakan batas jalan dengan trotoar, Yudi juga menghibau Korlantas dan Kemenhub benar-benar memperhatikan dan melakukan rekayasa lalu lintas tepat dan cepat.



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau jalur mudik exit tol di Brebes Timur

Sementara, titik kemacetan kedua di jalur pantura Jateng ini berada di proyek jembatan Sipait, Pekalongan Jawa Tengah.

"Tadi Kementerian PUPERA menyanggupi tanggal 30 Juni 2016 atau H-7 lebaran bisa dibuka jalur ini meskipun pembangun belum selesai, dan hanya diselesaikan satu lajur saja," jelasnya. Selanjutnya, Tim Komisi V DPR RI melanjutkan peninjauan kesiapan mudik di stasiun Tawang, Semarang. ■

(andi.mp) Foto: Antri/bf

Tinjau Kesiapan Mudik, Komisi V Sidak ke Cikampek, Cirebon dan Semarang

Tim Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke tol Cikampek di Kilometer 57 dan tol Cipali Kilometer 102 untuk mengecek kesiapan moda transportasi menghadapi arus mudik hari raya Idul Fitri 1437 H. Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana, ada tiga rombongan yang akan melakukan kunjungan kerja tersebut.

“ Hari ini saya memimpin rombongan yang ke Cikampek, Cirebon, Semarang. Serta ada juga rombongan ke Merak, Lampung, dan ke Jawa Timur” kata Yudi, saat melakukan kunjungan kerja spesifik di kilometer 57 dan 102, Kamis (23/6).

Yudi yang memimpin kunjungan ke Cikampek, Cirebon, dan Semarang mengatakan di sana Komisi V akan mengecek sejauh mana kesiapan jalan dan moda transportasi untuk menghadapi arus mudik kali ini. Hal ini juga dibenarkan rekannya politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yoseph Umarhadi.

"Kita akan melihat kondisi beberapa tol yang sedang disiapkan oleh Kementerian PU itu. Kita akan mulai dari sini sampai ke Solo," tutur Yoseph Umarhadi.



Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Yudi Widiana

Selain melihat kesiapan jalur tol baru, Yoseph Umarhadi menambahkan, *rest area*

di sejumlah jalan tol harus dipastikan kesiapannya.

"Mereka akan buka tol yang baru itu, jangan sampai terjadi seperti di tahun lalu di Cipali, jadi dipaksakan dibuka sementara kesiapan *rest area* ini masih sedikit, itu juga menjadi penumpukan, termasuk nanti tanda-tanda, rambu-rambu dari tol yang akan dibuka itu." ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Yudi pun mengimbau kepada para pengusaha angkutan untuk memungut tarif yang telah ditetapkan Kemenhub.

"Pemudik agar bekerja sama melaporkan dan menyampaikan aduan di posko-posko lebaran atas berbagai pelanggaran yang dilakukan jasa angkutan lebaran termasuk tingkat tarif dan layanan," tandasnya. ■

(andri,mp), foto: antri/br

Komisi III Ingatkan Tantangan Besar Kapolri

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa tantangan Kapolri baru sangatlah besar, terutama untuk mengembalikan kepercayaan rakyat dan kemampuannya dalam mengatasi tindak kejahatan yang tidak kecil di Indonesia, terlebih anggaran kepolisian yang cenderung minim jika dibanding tanggung jawabnya.

“ Hal itu disampaikan ketika memimpin uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Kapolri Komjen Muhammad Tito Karnavian di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (23/06).

"Salah satunya adalah minimnya anggaran. Alhamdulillah permintaan polri atas tambahan di APBN Perubahan kami telah menyetujui dan sudah dibahas di tingkat Banggar. Persoalan anggaran ini menjadi tantangan tersendiri bagi calon. Terlebih sebagian besar anggaran habis untuk belanja pegawai," ujar Bambang.

Hal itu, sambung Bambang, sebagai salah satu sebab sering ditemuinya anggota kepolisian yang melakukan kerja sambilan

untuk mengatasi persoalan ekonomi. "Itupun masih banyak yang menerima gaji dibawah upah minimum regional, oleh karenanya kita sering menemukan 1-2 polisi yang melakukan kerja sambilan menjadi tukang bakso, ojek, dan lain lain untuk mengatasi persoalan ekonomi," katanya.

Bambang juga menegaskan bahwa masa depan Polri ada ditangan calon tunggal Kapolri ini. "Hitam putih Polri ada ditangan saudara. Apakah saudara akan membawa Polri menjadi polisi rakyat atau sebagai alat pelindung kekuasaan. Semua ada di tangan saudara," tegasnya ketika mengawali *fit and proper test*.



Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo

Anggota Komisi III Didik Mukrianto juga menegaskan bahwa tantangan Kapolri sangat besar, salah satunya adalah melakukan penegakan hukum yang tidak tebang pilih. "Penegak hukum saat ini tidak independen, bahkan seolah dilakukan secara tebang pilih sehingga sangat mencederai keadilan," ujar Didik.

Oleh karenanya Politisi Partai Demokrat itu juga mempertanyakan bagaimana strategi Tito Karnavian dalam melakukan misi penegakan hukum yang

adil dan tidak tebang pilih di lingkungan Polri kedepan. "Seandainya anda terpilih jadi Kapolri, upaya dan jaminan apa yang diberikan agar penegakan hukum ini adil, transparan dan tidak tebang pilih," tanyanya.

Didik juga menegaskan bahwa tugas Polri tidak saja melindungi masyarakat, namun juga melakukan pemberantasan korupsi yang tidak tebang pilih. Ia juga mengingatkan bahwa institusi Polri mengalami krisis kepercayaan masyarakat

karena adanya kasus korupsi di internal Polri yang tidak diselesaikan secara tuntas.

Meskipun memiliki tugas yang berat, Komisi III juga mengakui hingga saat ini tidak ada aduan miring dari masyarakat terhadap calon Kapolri Tito Karnavian. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Komisi III telah memasang iklan pengaduan masyarakat terhadap Tito Karnavian. "Tidak ada satupun aduan miring masuk ke Komisi III. Dari KPK dan PPATK juga *clear*," ujar Bambang. ■

(b.s.m.p) Foto: Rumi/br

Panja Perekrutan PNS Tenaga Kesehatan Terima Masukan

Panitia Kerja (Panja) Perekrutan PNS Tenaga Kesehatan Komisi IX DPR RI menerima masukan dari salah satu tenaga kesehatan yaitu Pengurus Besar Ikatan Bidan Indonesia (PB IBI) dan Forum Komunikasi Bidan se-Indonesia.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena, sejumlah masukan yang mereka sampaikan diantaranya mengenai informasi jumlah bidan PTT yang telah teregistrasi.

"Sekarang sedang proses registrasi *online*, menurut informasi, memang masih ada simpang siur data. Bahkan menurut info yang kita peroleh ada kurang lebih 700 bidan PTT yang belum teregistrasi," ujar Ermalena usai rapat, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/6).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PPP ini mengatakan, dalam perekrutan ini masih ada empat kabupaten yang belum menandatangani MoU dengan Menteri Kesehatan, sehingga mereka nantinya akan di redistribusikan ke daerah lain yang mau menampung.

"Terkait hal itu, kami akan mengundang atau bisa saja kami yang akan ke kabupaten terkait untuk menanyakan hal ini," tuturnya.

Kemudian, tambah Ermalena, permasalahan lainnya mengenai uji yang harus dibedakan karena menurutnya bidan itu melatih *skill* jadi tidak tepat kalau tesnya mengenai pengetahuan umum. "Kita berharap bahwa perlakuan terhadap bidan ini harus beda, kenapa kita minta dibedakan karena ini masalah skill, karena selama ini kan mereka sudah teruji sudah melayani beberapa banyak persalinan dan

sebagainya,"katanya.

Untuk itu, Komisi IX, menurut Ermalena, berharap bahwa 42.245 Bidan PTT diangkat tanpa pengecualian. "Apalagi kalau dilihat dari MDGs ke SDGs kita memiliki rapot merah, salah satu rapot merah itu kematian ibu dan anak. Nah fungsi bidan itu sangat menentukan karena yang menentukan angka



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena

kematian tinggi itu adalah antara masalah persalinan, geografi dan kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan yang tidak terdistribusi secara merata," tegasnya.

"Kita berharap Kemenkes menghitung lagi pemerataan angka bidan agar angka kematian ibu dan anak dapat berkurang," tambahnya.

RDPU dengan para bidang ini menghasilkan dua kesimpulan yang pertama Panja Perekrutan PNS Tenaga Kesehatan Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi atas masukan yang disampaikan oleh Pengurus Pusat Ikatan

Bidan Indonesia (PB IBI) dan Forum Komunikasi Bidan PTT se Indonesia dalam RDPU hari ini, Rabu

22 Juni 2016 dan materi yang telah disampaikan akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan Panja Perekrutan PNS Tenaga Kesehatan Komisi IX DPR RI.

Kedua, Panja Perekrutan PNS Tenaga Kesehatan Komisi IX DPR RI meminta kepada Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PB IBI) dan Forum Komunikasi Bidan PTT se-Indonesia untuk memberikan laporan secara tertulis tentang kasus pungutan liar dalam proses rekrutmen bidan PTT paling lambat 28 Juni 2016. ■

(r.m.m), Foto: Juyadi/br

Negara Harus Bertanggung Jawab Atas Status Tenaga Kesehatan Yang Belum Jelas

Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mengatakan negara harus bertanggung jawab terkait belum jelasnya Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bidan PTT, pasalnya didalam UUD 1945 pasal 27 mengatakan negara berkewajiban memberikan pekerjaan kepada warga negara Indonesia dengan rasa aman dan nyaman.

“Ini ada loh di UUD dan memang tenaga kesehatan sangat dibutuhkan di negeri tetapi statusnya masih tidak jelas, dan bukan berlebihan, karena mereka memang dibutuhkan rakyat,”ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/6).

Legislator fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, Bidan PTT yang sedang melakukan rekrutmen CPNS ini sudah ada yang 30 tahun mengabdikan tanpa status yang jelas.

Lebih



Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning

lanjut ia menerangkan, keterbatasan bertemu dengan dokter dan faktor geografi yang luar biasa membuat Perawat dan Bidan itulah sahabat rakyat terdekat sehingga ini harus diperjuangkan. "Kemenkes harus bertanggung jawab, buat rapat sektor, bila perlu minta Presiden untuk mengkoordinasikan ini, karena kita butuh,"tegas Ribka.

Ribka berharap, negara dapat memberikan kesempatan kepada tenaga kesehatan yang ada, yang sedang berjuang menjadi dokter, bidan, perawat dan sebagainya.

"Anak-anak kita sekarang lebih pintar tidak kalah dengan Malaysia, tetapi tidak diberikan kesempatan dan terlalu banyak aturan yang dipakai, mereka seperti ini kan karena sistem. Padahal harusnya negara ikut menyekolahkan mereka. Malah bila perlu negara harus

mencerdaskan dokter tanpa mereka mengeluarkan uang, dengan mencari sponsor. Ini malah mau mengabdikan di negaranya sendiri rumitnya minta ampun,"katanya.

Sementara itu, di tempat yang sama Ketua PB IBI Emi Nurjasmu mengatakan, Bidan yang berstatus PTT mendapat perlakuan yang berbeda, dibatasi jika ingin mengikuti pendidikan, "Mereka akan ketinggalan, karena status tidak tetap. Supaya bidan di daerah merasa nyaman dan aman dalam bekerja perlu ada aturan yang jelas untuk mereka. Untuk itu kami sangat berharap kepada Komisi IX PTT diangkat PNS sudah harga Mati," tegas Emi.

"Agar teman-teman tidak resah dan merasa terombang-ambing, saya mohon anggota merencanakan waktu yang tidak terlalu lama karena ini prosesnya sudah berjalan. Sementara berkaitan dengan RUU Kebidanan, kami tetap perlu dukungan dan semangat. Kami tidak akan pernah mundur untuk memperjuangkan RUU Kebidanan, ini kepentingan bukan semata-mata untuk bidan saja tetapi juga untuk masyarakat. Karena masyarakat juga perlu terlindungi,"tambahnya. ■

(rum). Foto: Jeyadi/br

Pembebasan Visa WNA Lemahkan Sistem Pengawasan

Anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah menilai pemberian bebas visa untuk Warga Negara Asing (WNA) justru akan melemahkan sistem pengawasan terhadap WNA yang ingin bekerja tanpa memenuhi syarat dan prosedurnya.

“Apakah visa tetap bebas untuk semua negara atau ada negara yang harus pake visa?. Ini perlu diperhatikan karena visa merupakan dokumen penting orang bisa masuk Indonesia. Kemungkinan dikhawatirkan malah ada penyalahgunaan. Oleh sebab itu,

pemerintah harus lebih fokus pada upaya pengetatan pengawasan izin masuk bagi warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia," tegasnya saat Komisi IX DPR RI RDPU dengan Divhubter Mabes Polri, BIN, BAIS TNI dan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan

Ketenagakerjaan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/6).

Senada dengan Siti, Legislator Fraksi PPP Muhammad Iqbal mengatakan, dibebaskan visa dan dipermudahnya syarat akan membuat orang asing masuk dengan mudah.

"Saya menyesal dengan hal ini, dahulu ada 1:10 (satu orang asing harus di damping sepuluh tenaga kerja Indonesia-red) sekarang sudah dihapuskan. Dulu menggunakan bahasa Indonesia kini dihapuskan. Ini harus menjadi perhatian karena berdampak kepada tingkat serta jumlah tenaga kerja di Indonesia," tegasnya.

Iqbal menegaskan ini harus menjadi perhatian untuk memperbaiki persyaratan, jangan sampai mempermudah untuk menarik investasi tapi malah membahayakan, misalnya saja lima tenaga kerja asing yang masuk tanpa ijin ini hal yang sangat mengkhawatirkan.

"Banyak kasus tenaga asing melakukan tindakan yang melanggar hukum ini karena diberi kemudahan.



Anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah

Kedepannya Kemenaker jika membuat peraturan harus berkoordinasi, karena kalau sudah begini akan berdampak ke sistem keamanan," tuturnya.

RDP Panja kali ini guna mendapat masukan terkait pengawasan dan akses

pergerakan atau lalin orang termasuk investor dengan bebas masuk ke Indonesia dan kaitannya dengan kebijakan ekonomi.

Menurut Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, Komisi IX DPR RI khawatir terhadap masuknya Warga Negara Asing (WNA) melalui jalur tanpa visa, baik itu untuk investasi, pariwisata, dan sebagainya. "Maka dari

itu kami mengundang untuk mengetahui kelemahan di Kemenaker dan Imigrasi, sehingga kalau belum ada payung hukumnya panja ini bisa merumuskan payung hukum yg lebih kongkrit," pungkas Dede. ■

(rnm) Foto: Jayadi/br

Komisi IV Apresiasi Penghematan Anggaran Kemen. LHK

Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar beserta jajarannya. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, dan didampingi oleh Ketua Komisi Edhy Prabowo dan Wakil Ketua Daniel Johan, membahas tentang perubahan alokasi anggaran Tahun 2016.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto didampingi Wakil Ketua Daniel Johan

Dalam sambutan pengantar rapatnya, Siti Hediati menyampaikan bahwa Komisi IV memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian LHK dalam upaya penghematan anggaran dan peningkatan program bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi langkah penghematan anggaran yang sudah Kementerian LHK lakukan, yakni sebesar Rp 248 miliar lebih, yang dihemat dari biaya operasional. Serta banyaknya program untuk masyarakat yang juga telah ditingkatkan," ucap politisi F-Golkar tersebut di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6).

Setelah mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, serta tanggapan dari para anggota Dewan, pada akhirnya rapat kerja itu menghasilkan beberapa kesimpulan rapat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

"Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu RAPBN-P Kementerian LHK tahun 2016 sebesar Rp. 5.845.653.126.000,- dan Komisi IV juga meminta Kementerian LHK agar pada APBN-P tahun 2016 ini memprioritaskan untuk program kerakyatan serta program perlindungan dan pemulihan hutan," ujar Siti Hediati saat membacakan keputusan hasil raker tersebut. ■

(dep.mp) Foto: Naeffaraji/br

Legislator Ingatkan Tugas Konsolidasi Bagi Tito Karnavian

Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Alhabsyi mengingatkan Calon Kapolri Tito Karnavian untuk menjalankan tugas konsolidasi dan soliditas korps dengan para seniornya.

Hal itu disampaikan ketika melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Kapolri Tito Karnavian di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis, (23/6).

Ia pun juga mengapresiasi kehadiran senior-senior Tito dalam proses uji kelayakan dan kepatutan tersebut. "Pak Tito, saya lihat di belakang personil Polri dari angkatan di atas dan di bawah anda. Ini adalah sebuah peristiwa sejarah dalam Polri, ini momentum pembenahan Polri," ujarnya.

Legislator dapil Kalimantan Selatan I ini juga mengingatkan bahwa Tito memiliki beban psikologis karena akan menggantikan Badrodin Haiti yang berasal dari Akpol angkatan 1982, sedangkan Tito berasal dari angkatan 1987.

"Anda punya tugas konsolidasi, jenjang, dan kepangkatan. Bagaimana



Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Alhabsyi

langkah anda menjaga konsolidasi dan soliditas korps? Bagaimana anda akan menempatkan para senior?" tanyanya.

Ia pun juga mempertanyakan strategi Tito untuk mempertahankan hubungan baik antar lembaga penegak hukum. "Apa langkah anda untuk menghindari *overlaps* antar lembaga penegak hukum? Sesekali ada gesekan dengan personil TNI di

daerah, bagaimana anda akan mengatasinya?" ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Tito mengakui adanya dikotomi antara senior dan junior dalam institusi Polri, meskipun begitu ia menjelaskan bahwa hubungan lintas angkatan antara senior dan junior memiliki kepemilikan bersama agar Polri maju dan *survive* bagi publik.

"Lintas angkatan baik senior dan junior memiliki kepemilikan bersama agar Polri menjadi maju dan *survive* bagi publik," terang Tito.

Ia pun juga meyakinkan Komisi III bahwa insan

Bhayangkara memiliki keinginan kuat dan nyata untuk membangun institusi Polri. "Tinggal bagaimana kami membuktikan ketika ditunjuk sebagai pimpinan memiliki keinginan yang kuat dan nyata untuk membangun kepolisian. Dengan komitmen nyata yang dapat dilihat oleh senior, kami yakin senior juga akan mendukung," pungkas Tito. ■

(As.ump) Foto: Rami/br



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan Bakabeni jelang mudik lebaran

ASDP Diminta Tingkatkan Pelayanan

Untuk menghadapi padatnya penumpang jelang mudik lebaran dan pengembangan yang berkelanjutan, Anggota Komisi V DPR RI Anton Sihombing menghendaki, agar Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi air ini.

Komisi VI Setujui PMN 20 BUMN Rp 44,38 Triliun

Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN yang diwakili Menteri Keuangan memutuskan, memberikan pemberian penyertaan modal negara (PMN) kepada 20 BUMN sebesar Rp 44,38 triliun dari APBN-P 2016 yang terdiri atas PMN tunai sebesar Rp 28,25 triliun dan non-tunai Rp 16,13 triliun.

“Walaupun melalui perdebatan yang cukup alot, bahkan ada dua fraksi menolak, yakni F-PAN dan F-PDIP. Namun, dalam Rapat Pleno secara demokratis Komisi VI telah memutuskan sebanyak 20 BUMN mendapatkan suntikan dana APBN, dan menolak tiga usulan PMN tiga BUMN, antara lain PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia III dan PT Bahana PUI” kata Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno usai memimpin rapat tersebut di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Kamis (23/6).

Ia menambahkan, dalam kesimpulan rapat Komisi VI keputusan pemberian tunai PMN tersebut diprioritaskan pada program pemerintah antara lain, pembangunan infrastruktur dan kedaulatan

energi, kedaulatan pangan, dan program kelangsungan kredit usaha rakyat dan UMKM. Sementara PMN non-tunai diberikan setelah mendapat audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI Azman Natawijana mengatakan, agar PMN ini bisa dipertanggungjawabkan, dalam pelaksanaan PMN

BUMN tahun 2016 dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016, Kementerian BUMN harus membuat laporan secara berkala kepada Komisi VI DPR RI dan Komisi VI akan melakukan pengawasan, peninjauan langsung terhadap pelaksanaannya.

"Dalam setiap kunjungan kerja, saya menemukan dana PMN yang diberikan kepada sejumlah BUMN ini pertanggungjawabannya tidak jelas, untuk itu, PMN kali ini harus diawasi secara ketat," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, dana penyertaan modal negara (PMN) tersebut tidak termasuk kedalam anggaran pada Kementerian dan Lembaga, tetapi masuk dalam kategori belanja investasi perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja keuangan.

"Intinya pembiayaan PMN itu tidak diambil dari pemotongan belanja dan tujuan pemberian suntikan modal kepada BUMN bisa meningkatkan rasio leverage dan memberikan *return* memperkuat permodalan perusahaan," jelasnya. ■



Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno

Hal tersebut dia sampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Bakaheuni Lampung. "Tetapi walaupun demikian, ASDP kita minta meningkatkan pelayanan kelautan kepada penumpang, yang paling utama itu pelayanan publik," ungkap mantan Perwira Kepala Pelayaran ini, Kamis sore, (23/6).

Anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, mencari laba bukanlah hal utama bagi ASDP, hal ini beralasan, karena banyak infrastruktur, sarana dan prasarana pelabuhan dibiayai APBN.

"Bagaimana kita meningkatkan *zero accident* seperti yang ditargetkan pemerintah. Bukan cari untung bukan cari laba. Karena

banyak dari pembangunan fasilitas-fasilitas dari APBN," tandas Anton.

Terkait harga tiket, dia menilai masih dalam batas wajar. Tapi Anton mengharapkan, untuk waktu-waktu yang akan datang agar dikurangi sedikit. Dia juga meminta agar petugas-petugas di pelabuhan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan kepada pengguna angkutan, agar penumpang tidak ada yang miskomunikasi.

"Kan ada kapal yang bisa muat sampai 400 kendaraan, armadanya diperbanyak. Yang berbahaya itu yang bawa kendaraan roda dua, bagaimana menyusunnya di kapal. Itu yang penting. Di samping itu juga kita mintakan petugas-petugas di Pelabuhan Merak memberikan keterangan dan

informasi untuk membantu pemudik. Jadi jangan kosong informasi." paparnya.

Sebelumnya Tim Kunspek Komisi V DPR RI juga telah meninjau Bandara Radin Inten II, Terminal Rajabasa, jalan lintas Sumatera, dan Pelabuhan Bakaheuni. Anggota Dewan dari dapil Sumatera Utara III ini menilai secara keseluruhan sudah cukup bagus, hanya jalan raya saja yang memerlukan sedikit perbaikan.

"Secara umum cukup memuaskan, cuma jalan raya perlu ditambah sedikit pada jalur lintas Sumatera. Meski begitu mobil-mobil kecil jangan memaksakan dengan kecepatan tinggi bisa terjadi kecelakaan," ungkap Anton mengingatkan. ■

Komisi V Targetkan *Zero Accident* Saat Mudik Lebaran

Jelang mudik Lebaran, kesiapan segala macam kebutuhan transportasi menjadi perkara yang harus diproyeksikan sebaik-baiknya. Menyambut Hari Raya Idul Fitri yang menjadi euforia sebagian besar masyarakat Indonesia, Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Michael Wattimena meninjau secara langsung kesiapan infrastruktur transportasi di Provinsi Lampung dan dilanjutkan ke Banten.

Dari kunjungan kerja spesifik ini Michael mengharapkan kepada para penyelenggara transportasi agar bisa mewujudkan keselamatan untuk para penggunanya. "Target untuk *road map*

to zero accident bisa dicapai. Itu juga harapan seluruh rakyat, seluruh bangsa Indonesia," ungkapnya penuh harap di Pelabuhan Bakaheuni Lampung, Kamis sore (23/6).



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau terminal jelang mudik lebaran di Lampung

Beberapa titik strategis telah dilakukan pengecekan secara langsung oleh tim kunspek Komisi V, Bandara Radin Inten II, Terminal Rajabasa, jalan lintas Sumatera, dan Pelabuhan Bakaheuni.

Michael tim kunspek ini diikuti tujuh dewan anggota Komisi V DPR RI yakni Anton Sihombing (F-Golkar), Ade Rezki

Pratama (F-Gerindra), Rita Zahara (F-Gerindra), Umar Arsal (F-Demokrat), Musa Zaiuddin (F-PKB), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS) dan Syarieff Abdullah Alkadrie (F-Nasdem).

Setiap titik strategis tidak luput dari perhatian Tim Kunspek Komisi V, baik dari pos terpadu mudik, kondisi kendaraan hingga pelayanan penumpang. "Hari ini Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik, untuk melihat dari dekat kesiapan dalam rangka mudik lebaran tahun 2016," papar Michael.

Kunjungan ini juga disertai oleh jajaran Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan SAR Nasional, dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo berhalangan hadir sehingga diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Rifki Wirawan mengungkapkan, setelah kunjungan Komisi V DPR RI semoga ada masukan yang konstruktif untuk pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan transportasi yang baik untuk masyarakat.

"Setelah kunjungan ini semoga bisa menjadi bahan masukan untuk kelancaran transportasi di Lampung," ungkap Rifki. ■

(foto: Eka/br)

DPR RI Bersama Pemerintah Resmikan Rumah Khusus di Jayapura

Komisi V DPR RI bersama Pemerintah dalam hal ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meresmikan 100 unit rumah khusus untuk pimpinan Kelompok Keagamaan, Kepala Suku dan para Pelintas Batas di Jayapura, Papua, Sabtu (25/6).

“ Saya selaku pimpinan Komisi V DPR RI, sangat berbahagia, senang dan bangga telah terselesaikannya pelaksanaan pembangunan rumah khusus tahap pertama ini bagi pimpinan keagamaan, kepala suku, dan para pelintas batas,” kata Pimpinan Tim Kunjungan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena kepada wartawan usai peresmian.

Pembangunan rumah khusus ini, menurut Michael, diinisiasi oleh Majelis Rakyat Papua (MRP), dimana

peruntukannya bertujuan untuk para hamba-hamba Tuhan seperti, pendeta, ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang memang layak menerima rumah tersebut.

"Rumah khusus ini juga sangat istimewa perlakuannya, karena disini tipe 45 dan layak. Saat saya melakukan kunjungan kerumah khusus tersebut sangat sehat, dan harapannya menimbulkan keluarga yang sehat serta pada akhirnya menghasilkan anak-anak yang sehat dan cerdas bagi bangsa dan Negara," terang

Michael.

Politisi dari Partai Demokrat ini menambahkan, bantuan rumah khusus ini sangat membantu masyarakat untuk pembangunan rumah layak huni, "Ini merupakan program pembangunan sejuta rumah. Program besar Nawacita yang menjamin pemenuhan pelayanan dasar diseluruh wilayah bagi semua lapisan masyarakat," terangnya.

Lebih lanjut, harap Michael, pembangunan rumah khusus ini dapat mengurangi jumlah backlog perumahan, khususnya di tanah Papua.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerangkan pembangunan rumah khusus ini adalah program yang peruntukannya untuk perbatasan, nelayan, pemuka agama, guru, tenaga medis didaerah-daerah salah satunya seperti di Papua ini.

"Kita membangun sudah 2 ribu lebih ditahun 2015 hingga 2016. Ini akan terus

dilakukan. Untuk wilayah Papua sendiri memang alokasinya jauh lebih besar dari provinsi lainnya, namun pasti belum cukup karena memang kebutuhannya lebih banyak. Tentunya dengan persetujuan Komisi V DPR RI untuk memperbesar alokasi jumlah rumah yang boleh dibangun di Papua dan Papua Barat," jelas Menteri PUPR Basuki.

Basuki pun menerangkan, bahwa kita masih punya *backlog* rumah sekitar 13 juta, "Karena *backlog* rumah, makanya ada program sejuta rumah. Itu kan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah



Tim Kunspek Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR meresmikan rumah khusus di Jayapura

yang layak," pungkasnya.

Sementara itu, pemuka agama menyambut baik peruntukan rumah khusus ini, dan diharapkan dapat terus berkelanjutan. Perwakilan Kepala Suku

pun mengucapkan terima kasihnya kepada Pemerintah pusat, DPR RI, Pemprov, dan MRP atas pembangunan ini, "Kami patut mengucapkan syukur karena berkat yang cukup besar bagi Papua. Saya juga mengharapkan kepada bapak untuk terus melanjutkan di sisa pembangunan di 5 wilayah adat, agar Papua tetap berada di alam kesejahteraan" ujarnya.

Kunjungan Komisi V Kali ini, diikuti pula oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia (F-PKS), Saiful Rasyid (F-Gerindra), Ade Rezki Pratama (F-Gerindra), Willem Wandik (F-PD), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Ahmad H.M Ali (F-Nasdem), Musa Zainuddin (F-PKS). ■

(tul) Foto: Nita/br

Komisi X Setujui Pemotongan Anggaran Kemenpora

Komisi X DPR RI menyetujui pemotongan anggaran belanja Kementerian Pemuda dan Olahraga pada RAPBN-Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 609 miliar.

Selain itu, disetujui juga realokasi anggaran dari BA-BUN ke program kepemudaan dan keolahragaan untuk Jambore Pramuka 2016 sebesar Rp 56 miliar.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Utut Adianto

“ Anggaran yang dipotong ini bersumber dari beberapa program di Kemenpora,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Utut Adianto saat membacakan salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/6).

Beberapa program Kemenpora yang dipotong anggarannya diantaranya program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 10,1 miliar, program peningkatan prasarana dan sarana aparatur sebesar Rp 10 miliar, program kepemudaan dan keolahragaan sebesar Rp 262 miliar, dan program pembinaan olahraga prestasi sebesar Rp 326 miliar.

"Dengan adanya pemotongan anggaran sebesar Rp 609 miliar dan Rp 56 miliar, maka pagu definitif Kemenpora yang semula sebesar Rp

3,302 triliun, menjadi Rp 2,749 triliun pada RAPBN-P tahun 2016," jelas Utut.

Politisi F-PDI Perjuangan itu menambahkan, dalam rangka pengawasan dan evaluasi target kinerja Kemenpora, Komisi X DPR RI dan Menpora sepakat pelaksanaan APBN-P 2016 dilaporkan kepada Komisi X DPR RI per masa sidang.

"Namun terkait pemotongan anggaran ini, F-Gerindra Komisi X belum memberikan pendapat. Untuk selanjutnya, pemotongan tersebut diserahkan kepada Anggota Banggar DPR RI dari F-Gerindra," tambah politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Rapat juga menghasilkan kesimpulan, Komisi X dan Menpora akan membahas lebih lanjut terkait realokasi anggaran renovasi Kawasan Gelora Bung Karno sebagai rangkaian penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018 sebesar Rp 500 miliar. ■

(gf) Foto: Azka/br

Harga Daging Dipatok Pemerintah Rp 80 ribu/kg Tidak Rasional

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron menilai penetapan harga daging sapi segar dipasar Rp 80.000/kg seperti yang disampaikan pemerintah tidak rasional.

Dasalnya, harga sapi hidup dimasyarakat saja saat ini Rp 35.000/kg, bisa dipastikan harga dipasaran sekitar Rp 90.000. Apalagi harga daging segar dipasar saat ini merangkak naik diangka Rp 120.000/kg pada bulan Ramadhan.

"Saya kira ini perlu dikaji ulang, pemerintah harus menetapkan kerasionalitasan harga, sehingga dapat menjadi referensi harga yang menjadi ketetapan bersama. Jika harga daging berada diatas harga tersebut, pemerintah harus mengintervensi pasar, tetapi kalau jatuh pemerintah harus memberikan insentif kepada para peternak lokal. Dengan begitu, para peternak lokal masih tetap bisa menjaga harga" kata Herman Khaeron saat Kunspek Komisi IV DPR RI di Bandung, Senin (20/6).

Ia menambahkan, pemerintah dalam menetapkan harga perlu melihat kondisi kewilayahan Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau, sehingga membutuhkan



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI memantau harga dan kualitas pangan di Jawa Barat

transportasi dan distribusi yang memiliki biaya tinggi. Perlu dicatat, penetapan harga juga mengacu kepada harga petani, jadi kalau harga petani ditekan, harga dipasaran juga mengikuti.

Selain itu, lanjut Herman, walaupun Bulog mampu menjual dengan harga Rp 80.000/kg tetapi dapat dipastikan tidak untung. Mereka mendapatkan dana operasional dari raskin, pertama dari pembelian beras pemerintah terhadap bulog

yang kurang lebih Rp 1.050, adapun margin *fee* yang diperoleh oleh Bulog pada setiap satuan kg yang disalurkan melalui raskin.

Sehingga, pada waktu Bulog menyalurkan daging segar dengan harga Rp 80.000, mereka tidak membutuhkan biaya operasional. Lalu bagaimana dengan pihak swasta yang membutuhkan biaya operasional, jika harga yang ditetapkan seperti itu.

Politisi F-Partai Demokrat ini menuturkan, situasi mahalanya harga daging saat ini juga perlu dipikirkan, karena dulu harga daging sapi hidup bisa ditekan sampai Rp 25.000/kg. Barangkali yang membuat mahal itu karena kurs rupiah terhadap dollar, jadi bukan persoalan harga rupiah terhadap daging.

"Menurut saya, rasionalisasi penetapan harga itu semestinya tidak mengacu kepada negara Australia, Singapura, atau Malaysia yang mengimpor daging kerbau dengan harga Rp 40.000. Tidak bisa kita melakukan studi-studi kepada negara yang tidak bisa *dicompare* dengan Indonesia" jelasnya.

Dalam hal ini, Pemerintah juga harus menjelaskan kepada masyarakat, harus ada penetapan harga referensi berapa yang ditetapkan pemerintah sebagai harga yang layak dan yang proporsional. ■

(ikmp) / Foto: Jakub

BURT DPR RI Dorong RSUD Tarakan Lengkapi Fasilitasnya

Wakil Ketua Badan urusan rumah tangga (BURT) DPR RI, Elva Hartati mendorong RSUD Tarakan, Kalimantan Utara untuk melengkapi fasilitas dan pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut. Hal itu diungkapkannya usai meninjau rumah sakit terbesar di Kalimantan Utara itu, Kamis (23/6).

“Setelah mendapat pemaparan dari wakil direktur rumah sakit umum Tarakan ini kami (Tim kunjungan kerja BURT-red) meninjau langsung ruangan demi ruangan khususnya fasilitas yang diperuntukan bagi kami para anggota DPR RI yang notabene sebagai peserta Jamkestama (Jaminan kesehatan utama). Disini kami melihat di rumah sakit ini

memang sudah menyediakan ruang VVIP (Kelas standard bagi peserta Jamkestama) yang cukup luas. Namun saya lihat fasilitasnya masih sangat kurang. Sebut saja ruang VVIP yang masih belum ada peralatan dan tenaga medisnya," jelas Elva.

Bahkan, lanjut politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, dokter ahli jantung pun hanya ada satu di rumah sakit tersebut

yang konon juga merupakan satu-satunya ahli jantung di Kaltara. Padahal penyakit jantung merupakan penyakit yang datangnya tiba-tiba dan terkadang tidak terdeteksi sebelumnya. Menurut Elva, ini sangat penting, tidak hanya bagi peserta Jamkestama, namun juga untuk masyarakat umum lainnya.

Oleh karena itu ia berharap agar rumah sakit ini dapat segera melengkapi fasilitas kesehatannya, khususnya yang diperuntukkan bagi peserta Jamkestama dan masyarakat luas pada umumnya.

"Jika rumah sakit ini memiliki keterbatasan anggaran tentu bisa segera

Endang Srikarti Kunjungi Penderita Penyakit Kronis

Warga desa terpencil di Boyolali, Jawa Tengah, menderita penyakit kronis dan membutuhkan bantuan segera untuk penyembuhannya. Kemiskinan yang menyelimuti kedua orangtuanya telah membuat balita tersebut kian menderita.

Anggota DPR RI Endang Srikarti Handayani, Sabtu (19/6), mengunjungi penderita penyakit kronis di Desa Kedung Mulya, Kemusuk, Boyolali. Kondisi dua anak tersebut sangat memilukan. Adalah Rebo yang tergeletak lemah di pembaringan. Tubuhnya terlihat seperti balita, walau usianya sudah 18 tahun. Tumbuh tak normal sejak usia 7 bulan. Ia tak bisa mengunyah makanan dan tak bisa bicara. Dia hanya menangis bila menginginkan sesuatu.

Tawiyem orangtua anak itu, mengisahkan, saat dilahirkan tubuhnya normal. Namun, menginjak usia 7 bulan mulai terlihat ada perubahan fisik. Awalnya, diduga polio tapi tak mampu menyerap imunisasi yang diberikan saat balita. Belum diketahui kelainan apa yang diderita Rebo. Hingga 18 tahun ia terus tergeletak, tak berdaya. Sebuah box papan yang dibuat keluarganya menjadi tempat ia berbaring sepanjang hidupnya.

Suami Tawiyem sudah lama wafat. Selain ibunya, Rebo pun diasuh oleh nenek

menyengsarakan. Ibunda Rebo tak sanggup membiayai pengobatan buah hati tercintanya itu. Rebo sendiri anak kedua dari tiga bersaudara. Dua saudara lainnya tumbuh sehat.

Masih di desa yang sama, Endang juga mengunjungi balita penderita hydrocephalus bernama Siti Aisyah (2 tahun). Ia bungsu dari tiga bersaudara. Narti dan Junar kedua orangtua Aisyah pasrah dengan kondisi buah hatinya itu. Selain tak memiliki dana untuk mengobati Aisyah, dokter yang pernah didatanginya pun tak sanggup mengobati. Cairan abnormal dalam otaknya, terus membuat ukuran kepala Aisyah kian membesar.

Memilukan menyaksikan Aisyah tak berdaya dalam dekapan ibundanya. Aisyah juga tak mampu melihat dan berbicara. Dalam kesempatan itu, Endang yang Anggota Komisi VI itu, memberikan santunan pada dua anak yang menderita penyakit kronis di Desa Kedung Mulya. Kepada pers, ia menyerukan agar Menkes lebih sering terjun ke desa-desa untuk menyaksikan keluh kesah masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan.

Dua anak yang baru saja dikunjunginya perlu segera dibantu. Apalagi, mereka merupakan bagian dari rakyat yang diwakilinya dari dapil Jateng V (Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten). "Saya sangat prihatin melihat penderitaan Rebo dan Aisyah. Saya, memang, wajib mendengar keluh kesah rakyat yang saya wakili. Kemenkes perlu melihat anak-anak yang selama ini kekurangan gizi di daerah," ucapnya. ■



Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti bersama warga penderita penyakit kronis

dan saudara-saudaranya di gubuk sederhana berlantaikan tanah. Kemiskinan yang membelit keluarga ini, kian

Kesehatan pasti akan ikut mendorongnya," tambahnya.

RSU Tarakan ini merupakan salah satu rumah sakit *provider* yang bekerjasama dengan PT Jasindo, asuransi yang menangani Jamkestama untuk para anggota DPR RI.

Pada kesempatan itu Elva juga didampingi oleh Ketua BURT, Roem Kono, Wakil Ketua BURT, Agung Budi Santoso, dan Hasrul Azwar, serta anggota BURT lainnya seperti Anton Sukartono, Sri Melliyan, Refrizal, Indah Kurnia, Jamaludin Jafar, Yasti Soepredjo M, Agus Sulistiyono, dan Muhammad Farid Al Fauzi. ■

(Ayu), Foto: Ayu/hr



Tim Kunspek BURT DPR RI mengunjungi RSU Tarakan, Kaltara

diajukan kepada pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan) kebetulan saya juga sebagai anggota Komisi IX yang merupakan mitra kerja kementerian

Imam Suroso Kunjungi TKW Rita

Anggota Komisi IX Imam Suroso beberapa waktu mengunjungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Rita Krisdianti (27 tahun), tenaga kerja asal Ponorogo yang divonis mati karena kasus narkoba, yang telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan di Malaysia. Dalam kunjungannya, ia ditemani oleh pengacara yang disewa Perwakilan Republik Indonesia di Penang dan Kementerian Luar Negeri.

“ Saya datang langsung ke Malaysia untuk menengok Rita di Lapas, saya bicara secara langsung, saya didampingi oleh Mr Cong (pengacara-red), KJRI dan juga Kepala APJATI. Kedatangan kami ke Lapas diterima dengan baik oleh kepala penjara,” kata Imam sebelum Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Jakarta (27/6).

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam kunjungannya, Rita menceritakan kronologi secara jelas penyebab ia dikenakan vonis mati. “Dia menceritakan sambil menangis, dia bilang tidak tahu di dalam tasnya ada narkoba. dia hanya diajak untuk berbisnis pakaian,” tuturnya.

Selain berkunjung Legislator partai PDI Perjuangan ini juga memberikan dukungan kepada Rita, dan akan berusaha melakukan banding pada sidang berikutnya dengan membawa bukti baru.

“Saya akan kawal kasus ini, nanti saya

akan melakukan banding dengan membawa temuan baru, sebelum kesana saya sudah koordinasi dengan Kementerian luar negeri dan BNN, menurut saya insya Allah masih bisa diselamatkan dari vonis mati,” harapnya.

Dalam hal ini Pemerintah, jelas Imam, Kemenlu juga sudah bekerja dengan baik tapi tetap perlu di *support*, dirinya yakin masalah ini akan *clear*, dan nanti terakhir masih ada pengampunan dari Sultan. “Dulu saya menolong Dewi Sukowati yang akan dihukum mati juga tetapi tidak jadi,” terangnya.

“Saya menolong Dewi Sukowati yang di Singapura mau dihukum mati, tetapi alhamdulillah tidak dihukum mati hanya dihukum penjara biasa, saya ingin mengulangi keberhasilan itu kepada Rita.



Anggota Komisi IX Imam Suroso

Ia pun mengatakan menyesalkan hukuman yang diberikan, karena menurutnya tidak pantas Rita diberi hukuman mati, karena dia bukan pemakai atau pengedar narkoba. dia hanya orang yang dibodohi saja” tambahnya. ■

(rnm) Foto: Jayadi/br

Lima Puluh Persen Aset Pelindo IV Masih Dikelola Swasta

Tim Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk Pelindo II menggelar kunjungan spesifik untuk mencari materi perbandingan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia) ke Pelindo 4, Pelabuhan Makassar, Rabu (22/6).

“ Kita lagi minta perbandingan pengelolaan Pelindo II dengan Pelindo 4. Bagaimana tata kelola, baik barang dan jasa. Termasuk juga dalam ketaatan (PT Pelindo, red) dalam menjalankan peraturan atau perundang-undangan yang ada,” kata Ketua Tim Pansus Pelindo II ke Pelindo 4, Refrizal usai mengunjungi pelabuhan Makassar.

Politisi PKS ini meminta pada pengelolaan Pelindo 4 di Makassar untuk

mengambil alih semua pengelolaan pelabuhan dan tidak dibertugaskan kepada perusahaan swasta. Ia menyayangkan pengelolaan Pelindo 4 Makassar masih dikelola separuhnya oleh perusahaan swasta.

“Kita lihat tadi masih banyak kerja



Ketua Tim Kunspek Pansus Pelindo II Refrizal di Pelabuhan Makassar

sama (dengan pihak swasta) masih 50 persen. Ke depannya tidak ada lagi yang dikerjasamakan. Pemerintah seharusnya, kalau ini punya negara, BUMN ya seharusnya pemerintah menyiapkan seluruh infrastruktur atau apapun agar tidak ada ruang untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta," jelasnya.

"Maka paling tinggi kerja sama beberapa hal saja, bukan kerja sama semuanya seperti dia yang membangun dan dia mencari lahan. Sehingga kelihatannya negara tak punya daya untuk mengembangkan BUMN-nya sendiri. Kita

tadi banyak memberikan masukan sebagai solusi agar penanganan permasalahan Pelindo 4 segera diperbaiki," sambung politisi asal Dapil Sumatera Barat II ini.

Menurutnya, seluruh PT Pelindo yang ada sudah memiliki kinerja yang baik. Perusahaan plat merah itu sudah berada di jalur yang tepat dalam pengelolaan yang profesional dan modern.

"Semua pelindo mengarah pada *on the track*, semua baik. Tapi catatan kita, mereka tak bisa bekerja sama dengan swasta. Saya kira ini kunjungan akhir Pansus Pelindo 4 setelah ini kita mengambil kesimpulan

dari studi-studi komparatif yang kita lakukan. Itu yang jadi acuan dalam mengambil kesimpulan mengelola kepelabuhan di Indonesia," terangnya.

Refrizal mengungkapkan, waktu dekat ini pihaknya akan memberikan rekomendasi pada pemerintah terkait pengelolaan pelabuhan yang baik. "Rekomendasi kita perlu dibuat seperti apa dalam pengelolaan pelabuhan yang baik, profesional dan modern," pungkasnya. ■

(rmm.mp), Foto: Krcanu.br

Infrastruktur dan Angkutan Lebaran 2016 di Jatim Cukup Bagus

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Jawa Timur Muhidin M. Said menilai kesiapan infrastruktur dan angkutan lebaran 2016 di Jawa Timur dan khususnya di Surabaya cukup bagus.

“ Dalam kunjungan kerja spesifik di Surabaya ini dan di Jawa Timur secara umum terkait kesiapan angkutan lebaran tahun 2016, Komisi V DPR RI menilai cukup bagus,” kata Muhidin saat meninjau Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Kamis (23/06).

Ditegaskan politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, bahwa hasil peninjauan Komisi V DPR RI mulai dari Bandara Djuanda, jalan tol dan jalan-jalan yang akan dilalui dan diperkirakan akan padat lalu lintasnya, kemudian Terminal Bus Purabaya Bungurasih, Stasiun Kereta Api Pasar Turi, dan Pelabuhan Tanjung Perak cukup bagus kesiapannya.

"Hanya di Terminal Purabaya Bungurasih, kami menilai terminalnya cukup bagus tapi yang perlu diperhatikan adalah menyangkut kesiapan armada bus. Tadi kami menemukan beberapa bus yang kurang dari sisi keselamatan antara lain speedometer tidak berfungsi, ban yang sudah tidak layak serta rem yang kurang baik," papar Muhidin.

Ia mengaku, sudah meminta DLLAJR dalam hal ini angkutan darat agar memeriksa satu persatu bus-bus yang akan melayani angkutan lebaran, agar pada saat lebaran nanti tidak terjadi sesuatu hal yang



Tim Kunspek Komisi V DPR RI berdialog dengan Kepala Stasiun Pasar Turi

tidak diinginkan. Dan memberikan sanksi kepada bus-bus yang tidak layak dan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.

Dalam kesempatan tersebut, politisi dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah ini memberikan apresiasi kepada Stasiun Kereta Api Pasar Turi yang cukup siap sekali dalam menghadapi lonjakan arus mudik 2016. "Kami dari Komisi V DPR RI cukup senang dan menyambut dengan bagus sekali, karena kalau saya lihat kesiapan kereta api ini sangat luar biasa", ujarnya.

Apresiasi juga ia berikan kepada Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dimana dari hasil peninjauan Komisi V

DPR RI tidak ada satupun penumpang yang merasa tidak puas. "Bahkan penumpang menilai lebih dari cukup apa yang mereka dapatkan baik dari sisi kesiapan ketika akan berangkat, saat membeli tiket, dan pada saat mereka sudah berada di kapal, mereka mendapatkan pelayanan yang cukup, makanan yang cukup, fasilitas kamar mandi yang cukup, jadi semua merasa puas. Inilah yang sangat luar biasa," ungkap Muhidin yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini.

Muhidin meminta kepada semua pihak, agar dijaga dan diperhatikan terus, dan dilakukan koordinasi kepada semua pihak yang terkait dengan angkutan lebaran ini.

"Harapan dari kita semua khususnya Komisi V DPR RI dengan mitra kerjanya baik Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan betul-betul *zero accident* itu bisa, paling tidak kita bisa meminimalisir masalah-masalah ini," pungkasnya.

"Masyarakat kita, saudara-saudara kita yang akan kembali berlibur, yang akan kembali merayakan hari raya bisa tiba ditujuannya, bertemu keluarganya dengan senang dan bahagia sampai mereka pulang kembali ke tempat kerjanya masing-masing ini yang kita harapkan," tambah Muhidin mengakhiri. ■

(sc), Foto: Sincit/br

Konten Buku Bacaan Paud Tidak Sesuai Aturan

Komisi X DPR RI serap masukan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Perbukuan yang saat ini sedang dalam pembahasan bersama dengan pemerintah.

Menurut Pengurus Gerakan Anak Indonesia Membaca Bunda Lita mengatakan konten atau isi buku bacaan untuk anak usia dini yang tidak sesuai dengan Permendiknas RI No. 58 TAHUN 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

"Buku yang beredar dan digunakan untuk PAUD sekarang ini tidak sesuai dengan aturan tersebut. Oleh karena itu perlu dibentuk tim ahli penyusunan standar buku

Paud." ujarnya di hadapan Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI, di Surabaya, Jum'at (17/6).

Buku yang beredar, lanjut Lita, belum sesuai dengan spesifikasinya, seperti font, kertas 70 gram, warna dan aspek untuk tumbuh kembang anak usia dini masih belum diaplikasikan. "Bagaimana anak bisa menelaah," tegasnya.

Selanjutnya, jelas Lita, kurangnya buku cerita anak dengan harga terjangkau. Sementara ini ada buku cerita yang terjemahannya mahal dan isinya belum cukup untuk menumbuhkan karakter anak Indonesia. "Yang ada sekarang hanya mengedepankan tataran kognitifnya," lanjutnya.

Dewan Pertimbangan Ikapi Jatim Soegeng Boedhyanto mempertanyakan mengapa RUU Sistem Perbukuan belum juga disahkan, karena semakin lama RUU ini diabaikan akan menyebabkan kerugian di berbagai pihak.

Selain itu, Soegeng juga memberikan masukan untuk RUU Sistem Perbukuan, salah satunya yaitu buku umum yang belum diatur oleh Kementerian Pendidikan, ilustrator yang berhak mendapatkan royalti



Tim Kunspek Komisi X DPR RI serap masukan RUU Sistem Perbukuan di Surabaya

adalah yang menggambar satu buku penuh, kertas *brightness* harus ditentukan agar tidak merusak mata.

"Lalu mengenai harga kertas khusus yang dihapus oleh pemerintah bertentangan dengan ketentuan PBB dimana kertas untuk pendidikan harus dengan kertas khusus. Pemilik pabrik kertas di Indonesia meminta kepastian adanya permintaan terhadap kertas khusus tersebut," tambahnya.

Sementara itu, Muhammad afgan dari Asosiasi Toko Buku Jatim, berharap toko buku seharusnya menjadi ujung tombak distribusi buku kepada siswa.

Penjualan buku menurut Afgan mengalami kenaikan dan penurunan. Penjualan buku mengalami kelesuan sejak penerapan Kurikulum 13, karena buku langsung dibeli siswa di sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunjungan Spesifik My Esti Wijayanti menjelaskan dirinya berharap RUU Sistem Perbukuan dapat diselesaikan di tahun 2016.

"Insya Allah ditahun 2016 akan kita selesaikan. Masukan dari seluruh *stakeholder* tentunya akan membuat RUU ini semakin

baik," harapnya.

Esti menambahkan, DPR RI memahami RUU ini akan menjadi pijakan kita didalam sistem perbukuan yang sangat dibutuhkan oleh semua pihak. "Dengan adanya sistem perbukuan yang baik, bisa menjadi alasan untuk mencetak karakter anak bangsa melalui buku-buku yang diterbitkan," pungkasnya.

"Di sini sekaligus saya berpesan, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, terkait konten-konten buku yang akan dipublikasikan, sehingga kita mampu mencetak karakter anak

bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tentunya menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia," tambahanya. ■

Komisi II DPR RI menyetujui tambahan pagu anggaran Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp 88.570.875.000,00 yang berasal dari realokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) dan Rp 64.337.121.000.00 yang berasal dari penggunaan saldo awal kas Badan Layanan Umum (BLU) serta usulan pemotongan anggaran tahun 2016 sebesar Rp 154.155.318.000.00.

“ Hal itu disampaikan Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman ketika membacakan kesimpulan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Sekretaris Negara

Pemotongan Anggaran Diharapkan Tak Ganggu Kinerja Kementerian

Anggota Komisi II DPR RI Hetifah menyampaikan keberatannya soal penghematan anggaran di Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, jangan sampai penghematan tersebut justru membuat kerja Kemendagri mengalami kesulitan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Sekretariat Kabinet di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta pada Rabu, (22/06).

"Jangan sampai penghematan anggaran di Kemendagri justru membuat kerja Kemendagri mengalami kesulitan," ujar Hetifah.

Dalam kesempatan



Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian

tersebut, Politisi Golkar itu juga menyampaikan minimnya serapan anggaran di daerah perbatasan. Menurut data yang ia peroleh, serapan anggaran hanya berkisar 15%. Ia pun mempertanyakan apakah ada yang salah dalam menyusun perencanaan.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman itu memutuskan belum dapat menyetujui usulan pagu anggaran Kemendagri dalam RAPBN-P 2016 sebesar Rp 3.736.872.285.000,00 dan meminta agar jumlah anggaran yang dipotong sebesar Rp1.385.631.029.600,00 dapat dialokasikan kembali sebagian agar pencapaian target program Kemendagri 2016 dapat tercapai. "Terutama yang tercakup dalam Program Bina Pemerintahan Desa, program pembinaan politik dan penyelenggaraan pemerintahan umum serta program kependudukan dan catatan sipil,"

sambung Rambe.

Selain itu, Komisi II juga telah menyetujui usulan Setkab agar pemotongan anggaran terhadap Setkab sebesar Rp 30.961.668.500,00 menjadi sebesar Rp 13.374.271,00. "Dengan demikian Komisi II menyetujui usulan anggaran Setkab sebesar Rp 209.412.702.000.00 untuk ditetapkan sebagai alokasi anggaran Setkab pada APBN-P tahun 2016," jelas Rambe.

Tak hanya itu, Komisi II juga telah menyetujui usulan pemotongan anggaran BNPP tahun 2016 sebesar Rp 20.847.354.300,00 serta menyetujui usulan anggaran BNPP sebesar Rp 179.752.174.700,00 untuk ditetapkan sebagai alokasi anggaran BNPP pada APBN-P 2016.

Rambe juga menjelaskan bahwa Komisi II meminta Kemendagri, Setkab, dan BNPP untuk segera menyerahkan rincian kegiatan dan anggaran tahun 2016 paling lambat satu bulan setelah APBN-P 2016 disahkan. ■

(b.s.mp) / Foto: Ranti/br

Komisi II Setujui Pagu Anggaran Kemensetneg



Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman

dan Kepala Staf Presiden di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (23/06).

"Dengan demikian Komisi II menyetujui usulan anggaran Kementerian Sekretariat negara sebesar Rp 2.157.254.169.000.00 termasuk di dalamnya adalah alokasi anggaran untuk Kantor Staf Presiden sebesar Rp 144.473.579.000.00 untuk ditetapkan sebagai alokasi

anggaran Kementerian Sekretariat Negara pada APBN-P Tahun 2016," jelas Rambe.

Legislator dari dapil Sumatera Utara II juga menjelaskan Komisi II meminta Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden untuk menyerahkan rincian kegiatan dan anggaran tahun 2016.

"Komisi II meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden untuk menyerahkan rincian kegiatan dan anggaran tahun 2016 hasil perubahan paling lambat satu bulan setelah APBN-P 2016 disahkan nantinya," jelas Rambe. ■

(b.s.mp) / Foto: Ranti/br

Penataan Sistem Pasar Diyakini Atasi Gejolak Harga Sembako

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mengatakan, penataan sistem pasar terutama bagi produk sembako harus segera dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Langkah tersebut diyakini akan mencegah terulangnya lonjakan harga sembako di waktu yang akan datang.

“Penataan terhadap sistem pasar harus segera dilaksanakan,” tegas Herman dalam acara Dialektika Demokrasi 'Stabilitas Harga Pangan' bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan RI Gardjita Budi dan Direktur Pengadaan Bulog, Wahyu, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/06).

Politisi F-PD itu menambahkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penataan sistem pasar itu sendiri. Pertama, lanjut Herman, harus diketahui berapa jumlah konsumsi masyarakat terhadap produk-produk sembako sehari-hari.

"Aspek konsumsi seperti beras, daging sapi, kedelai, jagung dan gula. Sebenarnya berapa sih jumlah konsumsi masyarakat, sekarang ini kan untuk menyatakan jumlah konsumsi saja masih bingung," heran Herman.

Setelah itu, masih kata Herman, perlu dipastikan berapa kemampuan bangsa ini memproduksi sembako setiap tahunnya. Tanpa ada kepastian, tentu tidak akan mungkin kebijakan yang ditempuh pemerintah mampu mengantisipasi gejolak harga di pasar.

"Berikutnya aspek produksi. Berapa jumlah produksi kita, dan bagaimana bisa jumlah produksi meningkat sedangkan jumlah lahan produksi setiap tahunnya hilang 100 ribu hektar. Ini ada data yang perlu kita pastikan, bahwa data konsumsi dan produksi harus benar," kata Herman.

Demikian pula dengan proses distribusi. Herman mendesak agar pemerintah tidak memandang remeh proses distribusi



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam acara Dialektika Demokrasi

sembako hingga tangan masyarakat yang menjadi konsumen.

"Aspek distribusi. Untuk beras saja kita terdiri dari beberapa pulau. Ada 28 provinsi yang tergantung pada 6 provinsi sebagai produsen. Untuk daging 60 persen konsumsi ada di Pulau Jawa. Faktor distribusi ini penting. Kalau harga naik diurus dengan benar, tapi kalau santai dibiarkan saja," kata Herman.

Selain itu Herman juga menegaskan perlunya penguatan institusi bidang sembako yang sudah ada selama ini. Sayangnya belakangan ini institusi tersebut seolah-olah tidak difungsikan sebagai sarana stabilisasi harga sembako.

"Perkuat institusi yang ada. Jangan sampai Bulog dijadikan pemadam kebakaran dan tidak mampu melakukan tindakan preventif," kata politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Herman mengatakan, jika Presiden berkeinginan mengembalikan fungsi Bulog seperti semula, yaitu mengendalikan 11 komoditas pangan, jangan kalah dengan kuatnya permainan

kartel di tingkat operasional di lapangan.

"Keinginan Presiden Jokowi mengembalikan Bulog ke khittahnya sesuai dengan UU No. 18/2012, ternyata masih kalah dengan sangat kuatnya kartel di tingkat operasional lapangan. Jadi, kita serahkan kepada Presiden Jokowi untuk memperkuat Bulog. Bukannya

malah diperlemah," tegas Herman.

Menurut Herman, kartel-mafia itu akan selalu hadir, selama negara tidak hadir. Selama ini daging ayam dikuasai oleh sekitar 9 perusahaan, gula oleh 7 perusahaan, dan daging sapi oleh 10 perusahaan. Pangan dinilai sangat fundamental untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan harga, dan distribusi. Sebab, kalau tidak mampu, maka sistem perekonomian negara ini dipertanyakan.

"Apakah menganut sistem ekonomi liberal, kapitalis, dan atau kembali ke Pancasila? Kalau liberal dan kapitalis, maka tidak sejalan dengan Pancasila," imbuhnya.

Sementara itu Direktur Pengadaan Bulog, Wahyu mengatakan bahwa stabilisasi harga sembako bisa diselesaikan dengan mengaktifkan fungsi persediaan. Dengan persediaan yang memadai, maka kekosongan pasokan tidak mungkin terjadi. Sebab, kekosongan pasokan di pasar merupakan celah bagi spekulasi untuk mengambil keuntungan meski

merugikan masyarakat.

"Persediaan itu harus ada dan memadai. Baik beras, daging, dan yang lainnya kita harus punya persediaan. Kita harus punya tempat penyimpanan jika mau menampung semua produksi petani maupun masyarakat," kata Wahyu.

Ia menegaskan jika negara ini perlu lembaga penyangga pangan, tapi Bulog

sebagai BUMN hanya mengodinasikan tiga komoditas tersebut.

"Presiden Jokowi ingin Bulog seperti masa lalu, yang mem-back up 11 komoditas. Kalau kebutuhan sembako kurang, maka hanya Bulog yang impor, namun belum berhasil," katanya.

Wahyu memastikan, Indonesia menyediakan 2,1 juta ton Raskin untuk

12 bulan ke depan atau sebanyak 250 ton per bulan. Karena itu seharusnya negara menyiapkan stok untuk keamanan dan ketersediaan pangan.

"Kalau tidak, maka akan selalu terjadi gejolak harga. Ke-11 komoditas tersebut antara lain beras, jagung, kedelai, gula, garam, bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain-lain," imbuh Wahyu. ■

(ef) Foto: Kreano/hr

Pansus Pelindo Himpun Masukan Pengelolaan Pelabuhan ke Pelindo I

Panitia Khusus Angket Pelindo II kunjungi Pelindo I dalam rangka untuk memperoleh masukan dan pendalaman terkait aspek pengelolaan pelabuhan, khususnya terkait aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN, Perseroan Terbatas, dan Keuangan Negara. Demikian diungkapkan Ketua Pansus Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka saat berdialog dengan jajaran direksi PT. Pelindo I di Kantor Pelindo I Jl. Krakatau Ujung Medan, Sumatera Utara, Rabu (22/6).

Lebih lanjut Rieke mengemukakan Pansus Angket Pelindo II bukanlah Pansus biasa, namun khusus melakukan penyelidikan dan investigasi serta memiliki dasar hukum dan wewenang yang cukup luas, antara lain Pasal 2 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa "Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan."

"Pansus Angket Pelindo II memberikan perhatian besar kepada kinerja Pelindo secara umum. Temuan permasalahan di Pelindo II antara lain mengenai pengadaan barang dan jasa, perpanjangan pengelolaan JICT (Jakarta International Container Terminal), Tata kelola Pelindo serta pelanggaran tentang ketenagakerjaan," ungkap politisi partai berlambang banteng ini.

Politisi PDIP Dapil Jabar VII ini juga menegaskan, Pansus Angket Pelindo II menyelidiki adanya potensi kerugian negara, ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan, ketidakpatuhan terhadap prinsip dan tata kelola perusahaan



Pansus Pelindo II kunjungi Pelindo I di Medan

yang baik. "Kita juga sedang menunggu hasil investigatif BPK terkait perpanjangan kontrak JICT dan pembangunan Terminal Kalibaru," imbuhnya.

Mengakhiri sambutannya, Rieke yang hadir didampingi anggota Pansus Pelindo II antara lain Jhon Kennedy Azis, Irmadi Lubis, dan Anton Sukartono Suratno meyakinkan bahwa Angket Pelindo II mempunyai semangat yang sama untuk mengembalikan BUMN khususnya Pelindo sesuai amanah Pasal 33 UUD 1945. Dimana pelabuhan merupakan asset strategis sekaligus pintu gerbang kedaulatan sebuah negara.

Sementara itu, Direktur Bisnis Pelindo I Syahputera Sembiring menjelaskan sampai saat ini Pelindo I tidak pernah melakukan kerja sama operasional (KSO) dengan pihak manapun, termasuk pihak asing seperti yang dilakukan Pelindo II.

"Pelindo I merupakan perusahaan pelabuhan utama di Selat Malaka yang memiliki 16 cabang pelabuhan dan 11 pelabuhan kawasan dan merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia. Wilayah kerja Pelindo I memiliki *hinterland* yang didominasi oleh komoditas ekspor seperti kelapa sawit, karet, bahan tambang, plastik dan bahan kimia," jelas Syahputera.

Ia menambahkan bahwa target pertumbuhan Pelindo I menjadi pemain regional terbaik (Top Regional Player) di Tahun 2033 dengan dukungan lima (5) anak perusahaan yang melayani berbagai jasa kepelabuhan dengan **m e l a k u k a n p e n g e m b a n g a n -** pengembangan dari tahun ke tahun.

Saat ini Pelindo I fokus mengembangkan BICT (Belawan International Container Terminal) antara lain meliputi penataan area Belawan, mengembangkan terminal kontainer fase 1 dengan nilai investasi Rp 2,3 triliun dari tahun 2016-2019, pengembangan terminal container fase 2 nilai investasi Rp 2,7 triliun dengan durasi pengembangan 2016-2018 dan pengembangan alur belawan senilai Rp 1,2 triliun durasi pengembangan 2016-2017. Pelindo I juga belum lama ini menyelesaikan penataan terminal penumpang pelabuhan belawan," pungkas Syahputera. ■

(Odgit) Foto: Nacfarugji/hr

Komisi X Tetapkan Perubahan Alokasi Anggaran Bekraf

Rapat Dengar Komisi X DPR RI dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf, menetapkan perubahan alokasi anggaran Bekraf dalam RAPBN-Perubahan tahun anggaran 2016. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/06).

Riefky mengatakan, berdasarkan hasil RDP Komisi X DPR RI dengan Bekraf pada 8 Juni lalu, pemotongan anggaran sebesar Rp 243 miliar. Namun surat dari Pimpinan Badan Anggaran pada 23 Juni lalu, diputuskan pemotongan anggaran Bekraf hanya sebesar Rp 89 miliar. Sehingga ada selisih pemotongan anggaran sebesar Rp 153 miliar. "Atas selisih pemotongan anggaran sebesar Rp 153 miliar itu, Komisi X dan Bekraf



Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya

sepakat bahwa anggaran tersebut diprioritaskan untuk program penguatan ekonomi kreatif, seni dan budaya, fasilitasi dan advokasi pelaku ekonomi kreatif, HAKI, serta

penguatan kreatifitas di daerah-daerah," papar Riefky.

Politisi F-PD itu menambahkan, untuk pemotongan anggaran sebesar Rp 89,9 miliar, bersumber dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis sebesar Rp 1,78 miliar dan program pengembangan ekonomi kreatif sebesar Rp 88,1 miliar.

"Dengan adanya pemotongan anggaran sebesar Rp 89,9 miliar, maka pagu definitif Bekraf yang semula sebesar Rp 1,113 triliun, kini menjadi Rp 1,023 triliun," tambah politisi asal dapil Aceh itu.

Namun terhadap pemotongan anggaran ini, F-Gerindra Komisi X DPR belum memberikan pendapat, dan akan menyerahkan masalah ini kepada Anggota Bangkar DPR RI dari F-Gerindra. ■

(sf) Foto: Azka/fhr

Tingkatkan Posko Mudik Lebaran

Untuk mengantisipasi serta mempersiapkan penanganan secara cepat beragam permasalahan darurat saat mudik lebaran, selalu disediakan posko yang melayani para pemudik.

Anggota Komisi V DPR RI Rita Zahara mengharapkan, ada peningkatan layanan posko mudik lebaran di berbagai jalur strategis mudik lebaran. "Yang perlu ditingkatkan adalah posko-posko, disertai dengan personil memadai dan siap melayani dengan sepenuh hati. Jika terjadi hal-hal terkait arus mudik, teman-teman yang bertugas di posko siap 24 jam, seperti dokter dan personil lainnya," papar Rita saat kunjungan kerja spesifik, memantau kesiapan angkutan lebaran di Lampung, Kamis (23/6).

Setidaknya dalam posko mudik tersedia



Anggota Komisi V DPR RI Rita Zahara

dokter, paramedis, ambulans dan petugas kesehatan yang siap memberikan pelayanan bagi para pemudik. Selain itu yang diperlukan juga berupa, fasilitas istirahat,

pemeriksaan kesehatan sederhana, obat-obatan, tindakan sederhana yang bersifat darurat dan pemberian rujukan jika sangat diperlukan, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Selain posko mudik, Rita juga menghimbau masyarakat agar tertib dalam berlalulintas. Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini juga mengharapkan agar masyarakat menjaga keselamatan diri, serta berpartisipasi menciptakan kelancaran arus mudik.

"Masyarakat kita minta untuk tertib dan taat aturan. Jangan tergesah-gesah, semuanya dipersiapkan dengan baik," harap Rita. ■

(cto,mp) Foto: Eko/fhr



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI meninjau ketersediaan beras Bulog di Bandung

Komisi IV Temukan Raskin Berkualitas Jelek

Tim Kunjungan Komisi IV DPR RI mengakui adanya temuan beras miskin (raskin) yang dibeli dan akan didistribusikan oleh Perum Bulog Subdivre Bandung yang kualitasnya kurang baik (jelek). Karena itu, Bulog dituntut untuk lebih cermat membeli beras yang berkualitas untuk masyarakat.

“ Kepala Gudang Bulog menyampaikan jenis beras raskin yang ada sudah sesuai, namun harus kita check lagi, apakah jika dimasak bagus atau tidak, karena kami melihat warnanya agak kuning. Yang penting buat kami, untuk raskin harus mengutamakan kualitas, untuk apa kita bagikan kalau akhirnya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo usai meninjau Gudang Bulog di Bandung, Jawa Barat, Senin (20/6).

Ditambahkannya, kalau dilihat pecahan berasnya masih bagus, cuma warnanya saja yang agak gelap, tetapi sebenarnya masih ada yang lebih parah dari itu. Kalau melihat dari waktu

kedatangan beras baru 10 hari, berarti beras raskin ini masih baru, intinya ada hal yang harus diperbaiki.” Bagaimanapun raskin merupakan instrumen pemerintah untuk mengintervensi terhadap pasar,” tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan, persoalan kualitas beras raskin ini harus selaras dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Supaya raskin tidak identik dengan beras yang rusak, berkualitas rendah, tapi justru raskin dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin melalui ketersediaan beras yang murah.

Selain itu, kata Herman, ia menemukan tidak adanya stempel yang dicantumkan pada setiap karung beras,

sebagai tanda pemasoknya darimana, kemudian mengenai komitmen terhadap beras broken dan kadar air itu dicantumkan. Padahal, setahun yang lalu setiap karung beras ada stempelnya.

“Saya juga heran kenapa kosong, apakah ini terkait dengan persoalan yang terjadi di Solo pada waktu itu, supplier keberatan untuk dicantumkan. Menurut saya stempel ini menjadi penting, selain berguna untuk pengawasan, hal ini dimaksudkan kepada seluruh supplier dan mitra kerja Bulog agar mempunyai tanggung jawab terhadap berbagai tuntutan masyarakat, terutama terhadap kualitas dari raskin” tutup politisi F-Partai Demokrat ini. ■

(ik.mpi) foto - Jaka/mr

JENDELA PARLEMEN



Tim Komisi V berdialog dengan penumpang kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (23/6) Foto : Suci/hr



Tim Kunker BURT DPR RI saat meninjau RSU Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (23/6) foto : Ayu/hr



Tim Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Michael Wattimena, meninjau kesiapan terminal Rajabasa Lampung menghadapi arus mudik lebaran Kamis, (23/6) foto : eko/hr



Tim Panja RUU Kebudayaan Komisi X DPR RI dipimpin Ferdiansyah mengunjungi Desa Sade Lombok, NTB, (18/6). foto: Ray/hr



Menjelang Lebaran 2016 (Idul Fitri 1 Syawal 1437 H) Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani menggelar pasar murah di Solo, Jumat (24/6) Foto : Iwan/hr

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344



@dpr_ri



DPR RI



@DPR_RI



DPR RI